

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto

2.1.1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB didefinisikan sebagai nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha yang beroperasi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu (Badan Pusat Statistik, 2023). Nilai tambah tersebut diperoleh dari selisih antara nilai output yang dihasilkan dengan biaya antara dalam proses produksi. Menurut Tarigan (2015), PDRB mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan barang dan jasa serta menjadi alat analisis untuk melihat struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi regional. PDRB juga digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi kebijakan ekonomi wilayah.

Sjafrizal (2018) menyatakan bahwa PDRB memiliki peran penting dalam analisis ekonomi regional karena dapat menggambarkan tingkat aktivitas ekonomi, kontribusi sektor-sektor ekonomi, serta perkembangan pembangunan suatu daerah. Peningkatan PDRB menunjukkan adanya peningkatan produksi barang dan jasa yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Secara metodologis, PDRB dapat dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Dalam praktiknya,

pendekatan produksi paling umum digunakan dalam penyusunan PDRB menurut lapangan usaha oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Samosir et al., (2023) dalam jurnal E-Journal Perdagangan Industri dan Moneter juga memaparkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah ukuran agregat yang menunjukkan total nilai tambah bruto dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu wilayah dalam periode tertentu, yang mencerminkan kapasitas suatu daerah dalam menghasilkan barang dan jasa serta menggambarkan struktur ekonomi regional. Penelitian ini menjelaskan bahwa PDRB digunakan sebagai indikator utama dalam melihat perkembangan sektor-sektor usaha dan menjadi dasar untuk evaluasi kebijakan pembangunan regional. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran sebagai metode perhitungan PDRB, dengan pendekatan produksi sebagai pendekatan yang paling umum digunakan dalam penyusunan PDRB menurut lapangan usaha.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Produk Domestik Regional Bruto

Dalam analisis ekonomi regional, PDRB dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan dasar penilaiannya, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan (Badan Pusat Statistik, 2023).

1. PDRB atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

PDRB atas dasar harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Jenis PDRB ini digunakan untuk melihat struktur ekonomi suatu daerah dan kontribusi masing-masing

sektor terhadap total PDRB. Namun, nilai tersebut masih dipengaruhi oleh perubahan harga atau inflasi.

2. PDRB atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

PDRB atas dasar harga konstan dihitung menggunakan harga pada tahun dasar tertentu. Penggunaan harga konstan bertujuan untuk menghilangkan pengaruh inflasi sehingga dapat menggambarkan pertumbuhan riil ekonomi suatu daerah (Tarigan, 2015). Oleh karena itu, PDRB harga konstan lebih tepat digunakan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu.

2.1.1.3 Pendekatan Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat aktivitas ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB menggambarkan total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah. Dalam penyusunannya, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan beberapa pendekatan perhitungan untuk memperoleh nilai PDRB yang mencerminkan aktivitas ekonomi secara menyeluruh. Menurut Badan Pusat Statistik, PDRB dapat dihitung melalui tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran (Badan Pusat Statistika, 2023).

1. Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi menghitung PDRB berdasarkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor atau lapangan usaha dalam suatu wilayah. Nilai tambah diperoleh dari selisih antara nilai output yang dihasilkan dengan biaya antara yang digunakan dalam proses produksi. Dalam praktiknya, pendekatan ini

merupakan metode yang paling umum digunakan dalam penyusunan PDRB menurut lapangan usaha karena mampu menunjukkan kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB daerah.

2. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan menghitung PDRB berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Komponen pendapatan tersebut meliputi upah dan gaji tenaga kerja, keuntungan perusahaan, bunga modal, serta sewa atas penggunaan faktor produksi lainnya. Melalui pendekatan ini, PDRB mencerminkan distribusi pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan produksi di suatu wilayah.

3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran menghitung PDRB berdasarkan total pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai pelaku ekonomi untuk memperoleh barang dan jasa akhir. Komponen dalam pendekatan ini meliputi konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), perubahan inventori, serta ekspor dikurangi impor. Pendekatan ini digunakan untuk melihat struktur permintaan agregat dalam suatu perekonomian daerah.

Ketiga pendekatan tersebut pada dasarnya menghasilkan nilai PDRB yang sama karena mencerminkan aktivitas ekonomi dari sudut pandang yang berbeda, yaitu produksi, distribusi pendapatan, dan penggunaan barang serta jasa. Dalam praktiknya, penyusunan PDRB menurut lapangan usaha oleh Badan Pusat Statistik lebih banyak menggunakan pendekatan produksi karena dapat menggambarkan

kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap perekonomian daerah (Badan Pusat Statistik, 2023).

2.1.2 Industri Pengolahan

2.1.2.1 Pengertian Industri Pengolahan

Industri pengolahan merupakan kegiatan ekonomi yang mengubah bahan mentah, bahan baku, atau barang setengah jadi menjadi barang jadi atau barang dengan nilai tambah yang lebih tinggi melalui proses produksi. Proses tersebut dapat dilakukan secara mekanis, kimiawi, maupun manual dengan menggunakan tenaga kerja, mesin, dan teknologi produksi (Badan Pusat Statistik, 2023). Menurut Kuncoro (2013), industri pengolahan adalah sektor yang berperan dalam meningkatkan nilai tambah suatu produk melalui proses produksi sehingga menghasilkan output yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan bahan asalnya. Sektor ini memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi karena mampu meningkatkan produktivitas dan memperluas kesempatan kerja.

Walangadi et al., (2024) menyatakan bahwa sektor industri pengolahan merupakan bagian penting dari perekonomian regional karena bertindak sebagai penggerak utama dalam proses transformasi barang dasar menjadi barang jadi yang bernilai tambah, serta menyumbangkan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penyerapan tenaga kerja di wilayah yang diteliti. Dalam kajiannya, penulis menjelaskan bahwa pemahaman tentang struktur dan kontribusi sektor industri pengolahan menjadi penting untuk melihat peranan sektor ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih luas, termasuk

hubungannya dengan indikator-indikator ekonomi makro seperti PDRB dan ketenagakerjaan.

Todaro dan Smith (2015) menyatakan bahwa industrialisasi merupakan salah satu tahapan penting dalam pembangunan ekonomi, terutama di negara berkembang. Sektor industri pengolahan berperan sebagai motor pertumbuhan ekonomi karena mampu menciptakan nilai tambah tinggi, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong transformasi struktural dari sektor tradisional menuju sektor modern. Dengan demikian, industri pengolahan dapat dipahami sebagai sektor ekonomi yang mengubah input menjadi output bernilai tambah serta memiliki kontribusi besar dalam memperkuat struktur ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah.

2.1.2.2 Klasifikasi Industri Pengolahan

Klasifikasi industri pengolahan umumnya didasarkan pada skala usaha dan jenis kegiatan produksi. Berdasarkan skala usaha, Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan industri pengolahan menjadi industri besar, industri sedang, industri kecil, dan industri rumah tangga. Pengelompokan ini didasarkan pada jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi (Badan Pusat Statistik, 2023).

Industri besar merupakan industri yang memiliki tenaga kerja 100 orang atau lebih, sedangkan industri sedang memiliki tenaga kerja antara 20 hingga 99 orang. Industri kecil memiliki tenaga kerja antara 5 hingga 19 orang, sementara industri rumah tangga memiliki tenaga kerja kurang dari 5 orang. Klasifikasi ini

penting untuk melihat kapasitas produksi, penggunaan teknologi, serta kontribusi masing-masing kelompok industri terhadap perekonomian.

Selain berdasarkan skala usaha, industri pengolahan juga diklasifikasikan berdasarkan jenis kegiatan produksinya sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Klasifikasi tersebut meliputi industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, kimia dan farmasi, logam, mesin dan peralatan, serta industri lainnya yang melakukan proses pengolahan bahan menjadi produk bernilai tambah. Klasifikasi industri pengolahan menunjukkan bahwa sektor ini memiliki cakupan yang luas dan beragam, sehingga kontribusinya terhadap perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh perkembangan masing-masing subsektor industri.

2.1.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Industri Pengolahan

Industri pengolahan merupakan sektor yang perkembangannya dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi yang saling berkaitan. Menurut Sukirno (2016), kegiatan produksi dalam suatu perekonomian ditentukan oleh ketersediaan faktor-faktor produksi serta kondisi permintaan dan kebijakan ekonomi yang berlaku. Dalam konteks industri pengolahan, faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu faktor produksi, faktor lokasi dan infrastruktur, faktor kondisi pasar, serta faktor kebijakan pemerintah.

1. Faktor Produksi

Faktor produksi merupakan elemen utama yang menentukan kapasitas dan kemampuan industri dalam menghasilkan output. Sukirno (2016) menjelaskan bahwa kegiatan produksi dipengaruhi oleh modal, tenaga kerja, serta teknologi

yang digunakan. Tenaga kerja berperan sebagai pelaksana proses produksi. Ketersediaan tenaga kerja, tingkat pendidikan, keterampilan, serta tingkat produktivitas akan memengaruhi efisiensi dan biaya produksi industri.

Struktur upah juga menjadi bagian penting karena memengaruhi biaya operasional perusahaan. Modal atau kapital merupakan faktor produksi yang digunakan untuk membeli mesin, peralatan, dan membangun fasilitas produksi. Peningkatan modal akan memperbesar kapasitas produksi serta memungkinkan perluasan usaha. Selain itu, penggunaan teknologi yang lebih modern dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri.

2. Faktor Lokasi dan Infrastruktur

Lokasi industri berpengaruh terhadap biaya produksi dan distribusi. Menurut teori lokasi industri, kedekatan dengan sumber bahan baku atau pasar akan menurunkan biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi usaha. Infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, listrik, dan sarana transportasi lainnya sangat penting dalam mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi barang. Infrastruktur yang memadai akan menurunkan biaya logistik, mempercepat arus barang, serta meningkatkan daya saing industri. Sebaliknya, keterbatasan infrastruktur dapat menjadi hambatan bagi perkembangan sektor industri pengolahan.

3. Faktor Permintaan dan Kondisi Pasar

Lokasi industri berpengaruh terhadap biaya produksi dan distribusi. Menurut teori lokasi industri, kedekatan dengan sumber bahan baku atau pasar akan menurunkan biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi usaha. Infrastruktur

seperti jalan, pelabuhan, listrik, dan sarana transportasi lainnya sangat penting dalam mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi barang. Infrastruktur yang memadai akan menurunkan biaya logistik, mempercepat arus barang, serta meningkatkan daya saing industri. Sebaliknya, keterbatasan infrastruktur dapat menjadi hambatan bagi perkembangan sektor industri pengolahan.

4. Faktor Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan industri. Kebijakan fiskal, insentif pajak, kemudahan perizinan, serta stabilitas ekonomi akan memengaruhi keputusan investasi dan ekspansi usaha di sektor industri. Menurut Sukirno (2016), campur tangan pemerintah dalam bentuk kebijakan pembangunan dan penyediaan infrastruktur dapat mempercepat pertumbuhan sektor industri, terutama di negara berkembang.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada tiga aspek utama yang dianggap paling relevan dalam konteks perkembangan industri pengolahan antarprovinsi, yaitu Upah Minimum Provinsi sebagai representasi faktor tenaga kerja dan struktur biaya produksi, Belanja Infrastruktur sebagai representasi faktor sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri, dan Investasi sebagai representasi faktor permodalan yang menentukan kapasitas produksi dan ekspansi industri.

2.1.2.4 Teori Produksi

Teori produksi merupakan teori dasar dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan hubungan antara faktor-faktor produksi dengan tingkat output yang

dihasilkan dalam suatu kegiatan ekonomi. Menurut Sukirno (2016), produksi adalah kegiatan untuk menambah nilai guna suatu barang atau jasa melalui proses pengolahan dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia. Dengan demikian, tingkat output yang dihasilkan oleh suatu sektor ekonomi sangat ditentukan oleh kombinasi dan efisiensi penggunaan faktor produksi tersebut.

Dalam teori ekonomi, faktor produksi secara umum terdiri dari tenaga kerja (*labor*), modal (*capital*), dan teknologi (*technology*). Tenaga kerja berperan sebagai pelaku utama dalam proses produksi, modal digunakan untuk mendukung kegiatan produksi seperti mesin dan peralatan, sedangkan teknologi berfungsi meningkatkan efisiensi dan produktivitas faktor produksi. Mankiw (2019) menjelaskan bahwa perusahaan akan mengombinasikan faktor-faktor produksi tersebut untuk memaksimalkan output dengan biaya yang efisien.

Secara matematis, hubungan antara faktor produksi dan output sering direpresentasikan melalui fungsi produksi. Salah satu bentuk fungsi produksi yang umum digunakan adalah fungsi produksi Cobb-Douglas, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = AK^{\alpha}L^{\beta}$$

Keterangan:

Y = jumlah output atau hasil produksi yang dihasilkan dalam proses produksi

K = modal (*capital*) yang digunakan dalam kegiatan produksi

L = tenaga kerja (*labor*) yang digunakan dalam proses produksi

A = tingkat teknologi atau produktivitas faktor produksi

α dan β = elastisitas output terhadap perubahan modal dan tenaga kerja

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa output ditentukan oleh besarnya modal dan tenaga kerja yang digunakan serta tingkat teknologi yang mendukung proses produksi. Peningkatan salah satu faktor produksi, dengan asumsi faktor lainnya tetap, akan meningkatkan output yang dihasilkan.

Fungsi produksi Cobb-Douglass adalah suatu fungsi yang melibatkan dua atau lebih variabel, di mana salah satu variabel berperan sebagai variabel terikat (dependent variable) yang dijelaskan, sementara variabel lainnya merupakan variabel bebas (independent variable) yang berfungsi sebagai faktor yang menjelaskan. Untuk memudahkan dalam estimasi atau pendugaan terhadap persamaan di atas dapat dilakukan dengan mengubah bentuk linear berganda dengan cara menjadikannya dalam bentuk logaritma, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\text{Log}Y = \alpha + \text{Log}\beta_1 X_1 + \text{Log}\beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \text{Log}\beta_4 X_4 + e$$

a. Elastisitas

Elastisitas dalam fungsi produksi Cobb Dauglass mengacu pada seberapa besar perubahan output sebagai respon terhadap perubahan input tertentu. Karena model yang digunakan berbentuk log-log, maka koefisien regresi dari masing-masing variabel independen dapat langsung diinterpretasikan sebagai elastisitas. Secara umum, nilai elastisitas dikategorikan sebagai berikut:

1. Elastisitas (> 1): perubahan input sebesar 1% akan menghasilkan perubahan output lebih dari 1%. Input ini dikatakan sangat responsif terhadap output.

2. Inelastisitas (< 1): perubahan input sebesar 1% akan menghasilkan perubahan output kurang dari 1%. Artinya, input ini kurang responsif terhadap output.
3. Uniter ($= 1$): perubahan input sebesar 1% akan menghasilkan perubahan output sebesar 1%.

2.1.3 Upah Minimum Provinsi

2.1.3.1 Pengertian Upah Minimum Provinsi

Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan standar minimum upah yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan berlaku bagi seluruh kabupaten/kota di wilayah tersebut. UMP ditetapkan sebagai bentuk perlindungan bagi tenaga kerja agar memperoleh penghasilan yang layak sesuai dengan kebutuhan hidup minimum (Kementerian Ketenagakerjaan, 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman bagi pekerja. Penetapan upah minimum bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dari kemungkinan pembayaran upah yang terlalu rendah serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Rachman & Wasil, (2025) menyatakan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan salah satu instrumen kebijakan ekonomi yang tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan bagi tenaga kerja, tetapi juga memengaruhi kinerja sektor industri melalui perubahan struktur biaya produksi dan dinamika investasi. Dalam penelitiannya mengenai sektor industri manufaktur makanan dan minuman di Indonesia, ditemukan bahwa UMP berpengaruh signifikan terhadap Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB), sehingga kebijakan upah minimum turut menentukan perkembangan industri di tingkat regional.

Menurut Mankiw (2019), upah merupakan harga dari tenaga kerja yang ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Dalam konteks ekonomi regional, tingkat upah minimum dapat memengaruhi struktur biaya produksi perusahaan serta keputusan investasi dan penyerapan tenaga kerja.

2.1.3.2 Teori Upah

Dalam teori ekonomi tenaga kerja, upah merupakan kompensasi yang diterima tenaga kerja sebagai balas jasa atas kontribusinya dalam proses produksi. Dalam pasar tenaga kerja persaingan sempurna, tingkat upah ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja berasal dari perusahaan yang menggunakan tenaga kerja sebagai faktor produksi, sedangkan penawaran tenaga kerja berasal dari individu atau rumah tangga yang menawarkan jasanya di pasar kerja (Mankiw, 2019).

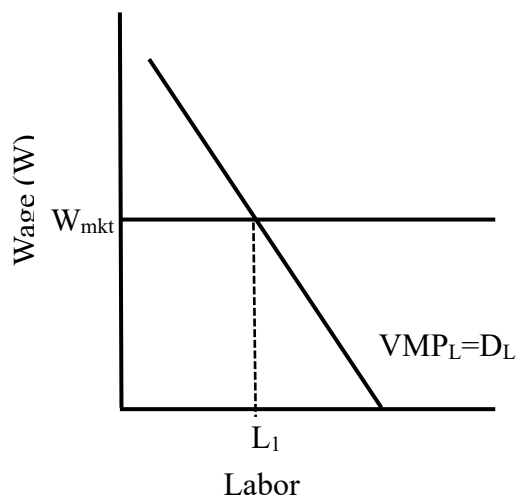
Teori upah neoklasik menyatakan bahwa perusahaan akan membayar tenaga kerja sesuai dengan produktivitas marginalnya. Produktivitas marginal tenaga kerja (*Marginal Product of Labor*) merupakan tambahan output yang dihasilkan dari penggunaan satu unit tenaga kerja tambahan dengan asumsi faktor produksi lainnya tetap (Borjas, 2016). Nilai tambah output tersebut disebut *Value of Marginal Product of Labor* (VMP_L), yang dirumuskan sebagai:

$$VMP_L = P \times MP_L$$

Dalam perspektif ekonomi makro, tingkat upah juga mempengaruhi kegiatan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan upah dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan permintaan agregat, namun di sisi lain dapat meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan (Mankiw, 2019).

Di mana VMP_L merupakan nilai produk marginal tenaga kerja, P adalah harga output, dan MP_L adalah tambahan output yang dihasilkan oleh tambahan satu unit tenaga kerja. Dalam kondisi pasar persaingan sempurna, perusahaan akan mempekerjakan tenaga kerja sampai pada tingkat di mana upah yang dibayarkan sama dengan nilai produk marginal tenaga kerja, yaitu:

$$W = VMP_L$$



Gambar 2. 1 Kurva Permintaan Tenaga Kerja (VMP_L) dan Tingkat Upah Keseimbangan

Kurva VMP_L bersifat menurun (*downward sloping*) karena berlakunya hukum diminishing returns, yaitu setiap tambahan tenaga kerja akan menghasilkan tambahan output yang semakin kecil apabila faktor produksi lainnya dianggap tetap

(Simanjuntak, 2001). Pada titik perpotongan antara kurva VMP_L dan tingkat upah (W), tercapai keseimbangan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan perusahaan.

Tingkat upah merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan perusahaan dalam menentukan penggunaan tenaga kerja dan kegiatan produksi. Perubahan tingkat upah dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam mengalokasikan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan produksinya. Dalam perspektif makroekonomi, tingkat upah juga memengaruhi kegiatan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan upah dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong permintaan agregat, namun di sisi lain dapat meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan (Mankiw, 2019).

2.1.4 Belanja Infrastruktur

2.1.4.1 Pengertian Belanja Infrastruktur

Belanja infrastruktur merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, listrik, air bersih, dan fasilitas publik lainnya. Belanja infrastruktur termasuk dalam kategori belanja modal karena menghasilkan aset tetap yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja negara/daerah adalah semua pengeluaran yang mengurangi kekayaan bersih negara dalam satu tahun anggaran. Dalam konteks pemerintah daerah, belanja infrastruktur umumnya tercermin dalam belanja modal yang digunakan untuk pembangunan fasilitas publik. Sari & Yudha, (2025) menyatakan bahwa belanja

pemerintah daerah pada sektor infrastruktur adalah komponen penting dari pengeluaran publik yang dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar. Dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa alokasi belanja untuk infrastruktur publik seperti jalan, listrik, dan fasilitas umum memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas konektivitas wilayah, menurunkan biaya logistik, serta mendorong aktivitas ekonomi regional melalui peningkatan efisiensi produksi dan distribusi barang dan jasa. Pemahaman ini menegaskan bahwa belanja infrastruktur bukan sekadar pengeluaran rutin, tetapi merupakan investasi publik jangka panjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih luas.

Sjafrizal (2018) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah karena dapat meningkatkan konektivitas, menurunkan biaya distribusi, serta memperlancar arus barang dan jasa. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi, produktivitas, dan daya saing wilayah.

2.1.4.2 Peran Belanja Infrastruktur

Dalam teori ekonomi publik, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hukum Wagner (*Wagner's Law*) menjelaskan bahwa seiring dengan meningkatnya tingkat pendapatan nasional dan perkembangan ekonomi suatu negara, maka peran pemerintah dalam perekonomian juga akan semakin besar, yang tercermin dari

meningkatnya pengeluaran pemerintah untuk menyediakan berbagai layanan publik dan pembangunan infrastruktur (Bazán, 2022).

Selain itu, pandangan Keynesian menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk meningkatkan permintaan agregat dan mendorong aktivitas ekonomi, terutama ketika perekonomian mengalami perlambatan. Melalui peningkatan belanja pemerintah, khususnya pada sektor infrastruktur, pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih luas (Bazán, 2022).

Verna Edwina, (2024) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa investasi pemerintah pada infrastruktur publik memiliki dampak positif terhadap produktivitas sektor swasta. Infrastruktur yang memadai dapat menurunkan biaya produksi, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memperkuat daya saing industri. Dengan demikian, belanja infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai pengeluaran pemerintah, tetapi juga sebagai faktor pendukung peningkatan output ekonomi dan produktivitas sektor industri.

2.1.4.3 Jenis-jenis Belanja Infrastruktur

Secara konseptual, infrastruktur merupakan bagian dari modal publik yang berfungsi mendukung kegiatan ekonomi dan sosial. World Bank mengklasifikasikan infrastruktur menjadi dua kelompok utama, yaitu *economic infrastructure* yang mencakup jalan, listrik, dan telekomunikasi, serta *social infrastructure* yang meliputi pendidikan dan kesehatan (World Bank, 1994). Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, belanja infrastruktur

direpresentasikan melalui pos belanja modal sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

Berdasarkan klasifikasi tersebut, jenis-jenis belanja infrastruktur yang tercermin dalam belanja modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Infrastruktur Transportasi dan Pengairan

Jenis belanja ini mencakup pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi, serta jaringan transportasi lainnya. Infrastruktur ini termasuk kategori infrastruktur ekonomi yang secara langsung mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa serta menurunkan biaya logistik industri.

2. Belanja Modal Infrastruktur Pelayanan Publik

Jenis belanja ini mencakup pembangunan gedung dan bangunan seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta sarana perkantoran pemerintahan. Infrastruktur ini termasuk kategori infrastruktur sosial yang berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik.

3. Belanja Modal Infrastruktur Penunjang Operasional

Jenis belanja ini mencakup belanja modal tanah serta belanja modal peralatan dan mesin yang digunakan untuk menunjang operasional fasilitas publik, seperti alat berat untuk pemeliharaan jalan atau peralatan medis untuk rumah sakit. Komponen ini berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas pelayanan dan produktivitas ekonomi daerah.

Penentuan jenis belanja modal sebagai indikator belanja infrastruktur didasarkan pada karakteristik pengeluaran tersebut yang menghasilkan aset tetap, memiliki

masa manfaat jangka panjang, dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan publik serta menstimulasi pertumbuhan ekonomi wilayah.

2.1.5 Investasi

2.1.5.1 Pengertian Investasi

Investasi merupakan kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh individu, perusahaan, maupun pemerintah dengan tujuan memperoleh keuntungan atau manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Dalam perspektif makroekonomi, investasi dipahami sebagai pembentukan barang modal yang dapat meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian (Todaro & Smith, 2015).

Menurut Sukirno (2016), investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh sektor swasta atau pemerintah untuk membeli barang-barang modal seperti mesin, peralatan, dan bangunan guna memperluas kemampuan produksi barang dan jasa. Investasi tidak hanya berfungsi sebagai komponen permintaan agregat, tetapi juga sebagai faktor penentu pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Simangunsong & Barika, (2025) menyatakan bahwa investasi dalam konteks perekonomian merupakan kegiatan penanaman modal yang dilakukan baik oleh sektor swasta maupun pemerintah yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembentukan modal tetap bruto. Penelitian ini menjelaskan bahwa investasi menciptakan akumulasi barang modal seperti mesin, peralatan, dan infrastruktur produksi yang memperluas kapasitas produksi, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya mendorong peningkatan output dan kesejahteraan. Dengan demikian, secara konseptual investasi dipahami sebagai pembentukan modal yang tidak hanya berfungsi sebagai komponen permintaan

agregat, tetapi juga sebagai faktor kunci dalam pembangunan ekonomi jangka panjang.

Sementara itu, dalam teori pertumbuhan ekonomi, investasi dipandang sebagai proses akumulasi modal yang dapat meningkatkan output nasional melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi (Jhingan, 2016). Dengan demikian, investasi memiliki peran strategis dalam mendorong perkembangan sektor industri serta meningkatkan nilai tambah dalam perekonomian daerah.

2.1.5.2 Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanamkan modal untuk menjalankan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik seluruhnya menggunakan modal asing maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang penting karena selain membawa tambahan modal, juga berpotensi mentransfer teknologi, pengetahuan manajerial, dan jaringan pasar internasional ke dalam perekonomian domestik. Keberadaan Penanaman Modal Asing (PMA) dapat meningkatkan kapasitas produksi industri serta memperkuat daya saing sektor manufaktur di tingkat regional maupun nasional.

Dalam konteks penelitian ini, realisasi PMA menjadi indikator investasi asing yang digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap perkembangan sektor industri pengolahan dan peningkatan nilai tambah yang tercermin dalam PDRB sektor industri pengolahan.

2.1.5.3 Teori Investasi

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam teori pertumbuhan ekonomi karena berkaitan langsung dengan pembentukan modal dan peningkatan kapasitas produksi. Dalam model pertumbuhan Harrod-Domar, investasi memiliki peran ganda, yaitu menciptakan permintaan agregat sekaligus menambah kapasitas produksi perekonomian. Peningkatan investasi akan meningkatkan penggunaan barang modal sehingga mendorong pertumbuhan output dan pendapatan nasional (Jhingan, 2016).

Selain itu, dalam model pertumbuhan neoklasik yang dikemukakan oleh Solow (1956), akumulasi modal melalui investasi menjadi faktor utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Investasi yang tinggi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui penggunaan teknologi dan peralatan produksi yang lebih modern. Dengan demikian, investasi tidak hanya memengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka pendek tetapi juga menentukan tingkat kesejahteraan dalam jangka panjang.

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, investasi memiliki peran strategis dalam mendorong perkembangan sektor industri. Masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, akan meningkatkan kapasitas produksi, mempercepat adopsi teknologi, serta meningkatkan efisiensi kegiatan industri. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan nilai tambah sektor industri yang tercermin dalam peningkatan PDRB, khususnya pada sektor industri pengolahan.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian terhadap berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini. Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hasil-hasil penelitian yang relevan, menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan, serta memperkuat landasan teoritis dan empiris. Selain itu, penelitian terdahulu juga menjadi acuan dalam menyusun kerangka pemikiran dan merumuskan hipotesis penelitian. Berikut merupakan ringkasan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Sumber
1	Eristian Wibisono, Amri Amir, Zulfanetti (2019)	Pengaruh Belanja Modal, Investasi, dan Tenaga Kerja terhadap Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jambi	Kuantitatif Regresi Linier Berganda	Belanja modal, investasi, dan tenaga kerja secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sektor industri Pengolahan di Provinsi Jambi	Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, ISSN 2549-3922 e-ISSN 2549-3930
2	Nabilla Zulfi, Mardiana, Ufira Isbah (2025)	Pengaruh PMA, PMDN dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Sektor Industri Pengolahan di Kota Pekanbaru	Kuantitatif Regresi linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel PMDN dan Tenaga Kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Sektor Industri Pengolahan di Kota Pekanbaru, variabel PMA memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB Sektor Industri Pengolahan di Kota Pekanbaru.	Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi Volume 4 Nomor 2, Oktober 2025 e-ISSN : 2828-7495; p-ISSN : 2828-7487, Hal. 98 - 110

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Sumber
3	Riqah Balqis, Sofyan Syahnur, dan Ernawati (2024)	Analysis of the Influence of Investment and Labor on Poverty Levels Through the Growth of the Indonesian Manufacturing Industry	The analysis methods used are multiple linear regression and Vector Autoregression (VAR).	The results of the analysis show that labor and investment partially have a significant and positive effect on the growth of the manufacturing industry.	Ekonomikalia Journal Of Economics, ISSN: 2988- 5787
4	Santi Nurwahyuni, M. Rayka Y Alwasi, Ade Komaludin, Jumri, Iwan Ridwan Faturrohman (2023).	Pengaruh Investasi Asing Langsung, Upah Kerja, dan Literasi Tenaga Kerja terhadap Industri Manufaktur di Indonesia	Kuantitatif Regresi linier berganda (data bulanan 20172021	Investasi Asing Langsung dan dan tingkat upah tidak berpengaruh signifikan terhadap industri manufaktur di indonesia.	WELFARE: Jurnal Ilmu Ekonomi, ISSN: 2723- 2220, e-ISSN: 2723-2212
5	Nurhayani(2022)	Analisis sektor industri manufaktur di Indonesia	Kuantitatif Regresi linier berganda (data timeseries)	Jumlah tenaga kerja dan investasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap industri manufaktur, sedangkan inflasi tidak berpengaruh signifikan.	Jurnal Paradigma Ekonomika, ISSN: 2085- 1960, e-ISSN: 2684-7868
6	Rica Citra Meisi, Zulfanetti, M. Syurya Hidayat (2021)	Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Unit Usaha terhadap PDRB Industri Pengolahan di Provinsi Jambi	Kuantitatif Regresi Linear Berganda	Secara simultan maupun parsial investasi, tenaga kerja dan unit usaha berpengaruh signifikan terhadap PDRB sektor industri pengolahan di Provinsi Jambi.	E-Journal Perdagangan Industri dan Moneter Vol. 9. No. 2, Mei- Agustus 2021 ISSN: 2303- 1204 (online)
7	Tulus, Abdul A Ahmad, Suharno (2020)	Pengaruh Indikator Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa	Kuantitatif Regresi Linear Berganda	Kredit modal kerja berpengaruh positif secara signifikan terhadap sektor industri pengolahan di Jawa Tengah,	<i>Ekonomis: Journal of Economics and Business, e-ISSN: 2587- 8829</i>

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Sumber
		Tengah		sedangkan upah minimum regional berpengaruh negatif secara signifikan. Variabel kredit industri pengolahan, kredit investasi, dan investasi tidak berpengaruh signifikan	
8	Hari Winarto, Zumaeroh, Diah Retnowati (2022)	Pengaruh <i>Human Capital</i> , Upah Minimum dan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Tengah	Panel VAR / <i>Time-Series Cross Country</i>	<i>Human capital</i> dan upah minimum regional berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan angkatan kerja tidak berpengaruh.	Ekonomis: Journal of Economics and Business, e-ISSN: 2597-8829
9	Rica Citra Meisi, Zulfanetti, dan M. Syurya Hidayat (2021)	Pengaruh investasi, tenaga kerja dan unit usaha terhadap PDRB industri pengolahan di Provinsi Jambi	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial investasi, tenaga kerja, dan unit usaha berpengaruh signifikan terhadap PDRB industri pengolahan di Provinsi Jambi. Secara simultan, investasi, tenaga kerja, dan unit usaha juga berpengaruh signifikan terhadap PDRB industri pengolahan.	E-Journal Perdagangan Industri dan Moneter Vol. 9. No. 2, Mei-Agustus 2021 ISSN: 2303-1204 (online)
10	Gilang Bondoyudho, Suharno, Abdul Aziz Ahmad (2022)	Determinan Produksi Industri manufaktur di Indonesia Tahun 2016-2021 (Pendekatan Regresia Panel Data)	Kuantitatif Regresi Data Panel	Modal dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan, pajak berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan investasi tidak	Jurnal Ekonomika dan Bisnis, ISSN: 2356-2439, e-ISSN: 2685-2446

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Sumber
				berpengaruh signifikan terhadap produksi sektor industri manufaktur di Indonesia	
11	Riska Aravina (2019)	Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sektor Industri Pengolahan di Kota Samarinda	Kuantitatif Regresi Linear Berganda	Investasi dan tenaga kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PDRB sektor industri pengolahan di Kota Samarinda.	Jurnal Ekonomi Mulawarman (JIEM), Vol. 4 No 2 (2019)
12	Dhea Putri (2019)	Pengaruh Tenaga Kerja dan Investasi Terhadap PDRB Industri Pengolahan di Pulau Jawa	Regresi Berganda Data Panel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PDRB industri pengolahan. Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB industri pengolahan. Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB industri pengolahan. Secara simultan, tenaga kerja, investasi PMA, dan investasi PMDN berpengaruh signifikan terhadap PDRB industri pengolahan.	Jurnal Pembangunan dan pemerataan Vol.8 No 3 (2019)
13	Agus Ropik, Yulmardi dan Jaya Kusuma Edi (2017)	Analisis Pengaruh Investasi, Unit Usaha, dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jambi	Kuantitatif analisis jalur (<i>path analysis</i>).	Secara simultan investasi, jumlah unit usaha, dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap PDRB sektor industri pengolahan, dengan investasi memiliki	e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Vol. 6. No.2, Mei-Agustus 2017 ISSN: 2303-1220 (online)

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Sumber
				pengaruh paling besar.	
14	Sanny Samosir, Rahma Nurjanah, Zainul Bahri (2023)	Analisis Determinan Sektor Industri Pengolahan di Indonesia	Kuantitatif Regresi Data Panel	Unit usaha dan jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB sektor industri pengolahan, sedangkan investasi tidak berpengaruh signifikan.	E-Journal Perdagangan Industri dan Moneter Vol.11 No.3, e-ISSN: 2303-1204
15	Horas Djulius (2019)	Nexus of Foreign Direct Investment, Domestic Investment, and Manufacturing Industry Value Added in Indonesia	<i>Panel Data Regression</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi asing langsung (FDI) dan investasi domestik (DI) berpengaruh positif terhadap nilai tambah industri manufaktur di Indonesia. Investasi domestik berpengaruh signifikan pada industri padat modal, sedangkan investasi asing langsung berpengaruh signifikan pada industri padat karya.	Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 8 No. 1 P-ISSN: 2087-2046 E-ISSN: 2476-9223

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan PDRB Sektor

Industri Pengolahan

Perkembangan sektor industri pengolahan tidak terlepas dari peran tenaga kerja sebagai faktor produksi utama. Dalam teori produksi neoklasik, tenaga kerja merupakan salah satu input penting dalam pembentukan output, di mana tingkat upah mencerminkan harga dari faktor produksi tenaga kerja (Mankiw, 2019). Upah

Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia ditetapkan melalui mekanisme tripartit yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam Dewan Pengupahan. Mekanisme ini bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan usaha dan perlindungan kesejahteraan pekerja. Dalam konteks industri pengolahan, perubahan tingkat UMP dapat memengaruhi struktur biaya produksi, terutama pada industri yang padat karya.

Temuan empiris menunjukkan bahwa tingkat upah minimum memiliki keterkaitan dengan kinerja sektor industri pengolahan. Penelitian oleh Winarto et al. (2022). Pengaruh Upah Minimum terhadap Industri Pengolahan di Jawa Tengah menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan upah tidak selalu berdampak negatif terhadap kegiatan industri, melainkan dapat mendorong produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan output industri.

2.3.2 Hubungan Belanja Infrastruktur dengan PDRB Sektor Industri Pengolahan

Infrastruktur merupakan salah satu faktor penting yang mendukung kegiatan produksi dan distribusi industri. Dalam kerangka fungsi produksi Cobb–Douglas, output ekonomi dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi yang bekerja secara simultan dalam proses produksi. Infrastruktur dapat dipandang sebagai bagian dari modal publik yang mampu meningkatkan efisiensi penggunaan faktor produksi serta memperbesar kapasitas produksi sektor industri. Ketersediaan infrastruktur yang

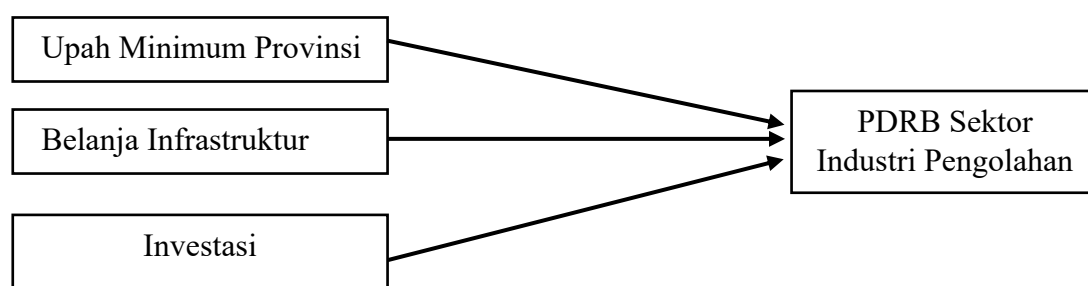
memadai seperti jaringan transportasi, energi listrik, dan telekomunikasi dapat memperlancar distribusi bahan baku, memperluas akses pasar, serta menurunkan biaya logistik sehingga meningkatkan produktivitas sektor industri (Verna Edwina, 2024).

Temuan empiris menunjukkan bahwa infrastruktur memiliki keterkaitan langsung dengan kinerja sektor industri pengolahan. Penelitian oleh Anas et al. (2017). Pengaruh Investasi Infrastruktur Jalan terhadap Sektor Industri Pengolahan menunjukkan bahwa investasi infrastruktur jalan berpengaruh terhadap sektor industri pengolahan melalui penurunan biaya transportasi dan peningkatan aksesibilitas antarwilayah. Infrastruktur yang memadai mampu menekan biaya produksi serta meningkatkan efisiensi distribusi bahan baku maupun hasil produksi, sehingga mendorong peningkatan output industri. Dengan demikian, belanja infrastruktur diduga berpengaruh positif terhadap PDRB sektor industri pengolahan karena mendukung kelancaran proses produksi dan meningkatkan daya saing industri di suatu wilayah.

2.3.3 Hubungan Investasi dengan PDRB Sektor Industri Pengolahan

Investasi merupakan faktor utama dalam meningkatkan kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam model pertumbuhan Harrod-Domar, investasi memiliki peran ganda, yaitu menciptakan permintaan agregat sekaligus menambah kapasitas produksi (Jhingan, 2016). Peningkatan investasi akan meningkatkan penggunaan barang modal dan teknologi sehingga mendorong pertumbuhan output industri.

Penelitian mengenai investasi asing di Indonesia menunjukkan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki kontribusi terhadap peningkatan kinerja sektor industri pengolahan. Studi yang dilakukan oleh Azwin Alfarizsy & Ekananda, (2024) menganalisis pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) terhadap nilai tambah industri pengolahan di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa FDI berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai tambah industri pengolahan, yang mencerminkan bahwa peningkatan realisasi investasi asing mampu memperluas kapasitas produksi serta meningkatkan efisiensi sektor industri. Temuan ini menunjukkan bahwa masuknya PMA tidak hanya menambah modal finansial, tetapi juga membawa transfer teknologi, peningkatan manajerial, serta modernisasi proses produksi di sektor industri pengolahan.



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat disimpulkan rumusan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga Upah Minimum Provinsi, Belanja Infrastruktur dan Investasi berpengaruh positif secara parsial terhadap PDRB Sektor industri pengolahan Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2020-2024.
2. Diduga Upah Minimum Provinsi, Belanja Infrastruktur, dan Investasi secara simultan berpengaruh terhadap PDRB sektor industri pengolahan Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2020-2024.